

Kemiskinan dan Daerah Otonomi Khusus Di Indonesia

Oleh: Dwi Harsono, Pandhu Yuanjaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kemiskinan di daerah otonomi khusus yang memperoleh alokasi dana untuk pengelolaan urusan di daerah dan menganalisis relevansi otonomi khusus yang diperoleh dengan tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonomi khusus. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena salah satu tujuan dari otonomi khusus adalah memberikan kemandirian pada daerah untuk melakukan pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat lokal, termasuk untuk pengentasan kemiskinan. Yang menarik, angka kemiskinan di daerah otonomi khusus memiliki persentase yang relatif tinggi bahkan melebihi angka kemiskinan nasional.

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Teknik dokumentasi digunakan sebagai metode utama untuk pengumpulan data. Peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari data dokumentasi yang terdapat pada lembaga terkait seperti, pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPS, World Bank, ADB. Di samping itu, data juga diperoleh dari media massa serta sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal.

Berdasarkan temuan penelitian di daerah otonomi khusus, yaitu Yogyakarta dan Papua Barat yang menjadi studi kasus, menunjukkan bahwa implementasi otonomi khusus di Indonesia belum dapat menurunkan angka kemiskinan dengan signifikan. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Yogyakarta, program-program yang didanai dana otsus diharapkan dapat memberikan leverage effect pengentasan kemiskinan. Namun efek leverage tersebut belum terlihat berhasil dalam pelaksanaan program otonomi khusus di Yogyakarta. Pemberian otonomi khusus di Papua Barat juga masih belum menunjukkan hasil yang seharusnya. Masyarakat masih terbelenggu kemiskinan multidimensi. Pendidikan dan kesejahteraan masih pada peringkat terbawah di Indonesia. Jumlah dana yang terus bertambah tiap tahunnya belum dapat mengubah kondisi tersebut. Pemerintah daerah perlu terus berupaya merancang beberapa program penanggulangan kemiskinan melalui dana otsus. Kinerja birokrasi dan pemerintah banyak menjadi penyebab sumberdaya yang dimiliki tidak dapat mensejahterakan masyarakat karena terhenti pada birokrasi dan pemerintah.

Kata Kunci: *Kata Kunci : kemiskinan, otonomi khusus, dan desentralisasi asimetris*